

Judul : Agar masyarakat cari alternatif: BPJS Kesehatan diminta beberkan rumah sakit yang putus kontrak
Tanggal : Sabtu, 05 Januari 2019
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 6

Agar Masyarakat Cari Alternatif BPJS Kesehatan Diminta Beberkan Rumah Sakit Yang Putus Kontrak

DPR meminta BPJS Kesehatan segera memberikan informasi pasti mengenai jumlah dan data rumah sakit (RS) yang kontraknya sudah habis atau belum terakreditasi. Dengan begitu, masyarakat bisa mencari RS alternatif saat akan menjalani pengobatan.

Per 1 Januari kemarin, sejumlah RS di daerah mengumumkan tidak lagi melayani pasien BPJS. Pihak BPJS ber alasan, hal tersebut terjadi karena masalah akreditasi RS yang bersangkutan. Alhasil, kontraknya belum diperpanjang. Namun, BPJS masih belum mengumumkan berapa jumlah RS yang belum terakreditasi dan yang kontraknya belum diperpanjang tersebut.

"Kami mendesak BPJS Kesehatan untuk memberikan informasi data rumah sakit yang tidak lagi bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dengan begitu, masyarakat dapat mencari rumah sakit alternatif untuk melakukan pengobatan. Sebab, pemutusan kontrak kerja itu mengakibatkan rumah sakit tersebut sudah tidak lagi menerima pasien BPJS Kesehatan," ujar Ketua DPR Bambang Soesatyo, kemarin.



Bambang Soesatyo

Politisi yang akrab disapa Bamsoet ini juga meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tidak tinggal diam dengan masalah ini. Kemenkes harus segera turun gunung. Agar masalah ini segera selesai. Jika berlarut-larut, tentu banyak masyarakat menjadi korban.

"Kami meminta Kementerian Kesehatan aktif meminta rumah sakit yang masa akreditasinya habis ataupun yang belum mempunyai izin operasi. Rumah sakit itu harus segera memproses atau mengurus syarat-syarat akreditasi dan izin operasional.

Sebab, akreditasi dan izin beroperasi rumah sakit merupakan syarat wajib untuk bekerja sama dengan BPJS Kesehatan," jelasnya.

Pihak BPJS Kesehatan masih belum mau membeberkan jumlah RS yang kontraknya sudah habis tersebut. "Belum bisa disebutkan berapa. Harus koordinasi dulu dengan pihak Kemenkes," ujar Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma'ruf, kemarin.

Sebelum ini, jumlah RS yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sebanyak 2.217. Jumlah tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Iqbal menyatakan, BPJS Kesehatan punya data RS-RS yang kontraknya habis atau yang belum terakreditasi. Namun, pihaknya tidak bisa mengumumkan jumlah itu dan membeberkan nama-namanya.

Dia beralasan, pihak yang berwenang mengumumkan RS-RS tersebut adalah Kemenkes. Makanya, dia menyarankan ke pihak yang ingin tahu RS-RS tersebut bertanya langsung ke Kemenkes. "Lebih baik tanya Kemenkes saja yang pastinya," imbuhnya. ■ ONI